



KOLABORASI ANGGOTA
KOMUNITAS PENULIS ILMIAH NUSANTARA

ideas
PUBLISHING

Kontribusi Ilmuwan dan Praktisi

**untuk 76 Tahun
Kemerdekaan Indonesia**

Peningkatan Literasi dalam Era Society 5.0

**Kontribusi Ilmuwan dan Praktisi
untuk 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia
(Peningkatan Literasi dalam Era *Society5.0*)**

IP.043.10.2021

**Kontribusi Ilmuwan dan Praktisi
untuk 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia:
Peningkatan Literasi dalam Era *Society 5.0***

Abditama Srifitriani, Dihamri, Haimah, Amir Hamzah,
Aries Abbas, Sitti Aisyah, Yuyun Yuniarsih, Aries utomo,
Ariesa Pandanwangi, Efnie Indrianie, Elizabeth Ari Setyarini,
Ellen Theresia, Gianti Gunawan, Henny Suharyati,
Indah Soca R. Kuntari, Lisa Rakhmanina, Feny Martina,
Meilani Rohinsa, Missiliana Riasnugrahani, Nelly Wedyawati,
Olga Catherina Pattipawaej, Ria Wardani, Rosida Manurung,
Maria Yuni Megarini Cahyono, Sedarnawati Yasni, SeTin SeTin,
Stefani Lily Indarto, Tery Setiawan, Antonius Suhartomo,
Wiwik Ariesta, Yuspendi

Pertama kali diterbitkan pada Oktober 2021

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110

Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI No. 001/GORONTALO/14

ISBN: 978-623-234-193-7

Penata Letak : Siti Khumaira Dengo

Desainer Sampul : Ilham Djafar

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik dan mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, maupun dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

17. Literasi dalam Era *Society 5.0*:
Baby Boomers, Internet, dan Cyberchondria
Ria Wardani..... 225
18. Kontribusi Literasi Buku Bacaan Anak
terhadap Penguatan Karakter
Rosida Manurung & Maria Yuni Megarini Cahyono...245
19. Kemampuan Mengembangkan Produk Enkapsulasi
Berbahan Dasar Nanopartikel Ekstrak Kulit Manggis Merah
untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
Sedarnawati Yasni..... 257
20. Kebebasan Akademik
SeTin SeTin..... 269
21. Tantangan dan Strategi Pembelajaran Akuntansi
di Era *Society 5.0*
Stefani Lily Indarto..... 283
22. Pascapandemi *Covid-19* adalah Panggung Kerja Sama
antara Psikologi dan Kerekayasaan
Tery Setiawan & Antonius Suhartomo 299
23. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran
Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah *Society 5.0*
dalam Mengembangkan Metaliterasi:
Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar
Wiwik Ariesta..... 309
24. Peran *Parental Mind-Mindedness*
dalam Meningkatkan Literasi Anak di Era *Society 5.0*
Yuspendi 333

“
**Kontribusi
Ilmuwan
&
Praktisi**
untuk 76 Tahun
Kemerdekaan Indonesia
”

Peningkatan Literasi
dalam Era Society 5.0

Book chapter ini terdiri atas 24 artikel yang ditulis oleh lebih dari 20 penulis. Kehadiran book chapter KaPIN ini dengan karya-karya lain yang dihasilkan bagaikan oasis di tengah padang pasir. Diharapkan para penulis saling bersinergi untuk turut andil dalam menyambut 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia dan menyongsong era society 5.0, yaitu menjadi penulis yang menginspirasi lewat karya yang dihasilkan dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas terutama dalam bidang literasi.

ideas
PUBLISHING

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie, No. 110 Kota Gorontalo 96128
Pos-el: infoideaspublishing@gmail.com
Website: www.ideaspublishing.co.id

ISBN 978-623-234-193-7



9 786232 341937

Kebebasan Akademik

SeTin SeTin
Universitas Kristen Maranatha
se.tin@eco.maranatha.edu; setin2005@yahoo.com
chapterbookKaPIN@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebebasan akademik mengacu pada kebebasan mengajar dan meneliti tanpa ada rasa kekhawatiran terhadap tekanan dan ancaman dari pihak manapun (Tierney & Lanford, 2014). Kebebasan akademik terkait dengan kualitas institusi yang menghormati peran penting pendidikan tinggi dan memberikan ruang intelektual yang menghormati penyelidikan bebas dan ekspresi. Dunia yang penuh dengan permasalahan membutuhkan solusi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih cepat dari sebelumnya, sehingga kebebasan akademik juga menjadi lebih penting dari sebelumnya sebagai mesin intelektual untuk kreativitas dan inovasi.

Pada masa perkembangan internet yang begitu cepat, yang mana informasi juga begitu cepat masuk ke dalam ruang ruang publik, apa dampaknya bagi kebebasan akademik? Apakah internet menimbulkan masalah bagi kebebasan akademik? Apakah prinsip kebebasan akademik yang bebas terhadap tekanan dan ancaman masih berlaku? Dewasa ini, para akademisi di seluruh dunia menghadapi serangan dengan terus dikritik oleh agen politik, sosial, dan budaya karena ide-ide mereka, bahasa mereka, ataupun temuan dari penelitian mereka, dengan berbagai alasan (Butler, 2017). Ini berarti kekhawatiran tentang kebebasan akademik adalah hal yang wajar. Internet menggeser tempat di mana para ilmuwan / akademisi berbicara kepada masyarakat, dari yang awalnya melalui jurnal-jurnal ilmiah, menjadi memanfaatkan ruang publik, seperti blog dan situs jejaring sosial. Informasi yang masuk ke dalam ruang publik sekaligus memberikan tantangan dan ancaman bagi kebebasan akademik.

Tulisan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali bagi insan perguruan tinggi tentang esensi kebebasan akademik. Berturut-turut, tulisan ini memaparkan tentang prinsip universitas sebagai mimbar kebebasan akademik; esensi kebebasan akademik yang membedakannya dengan kebebasan berbicara/ berekspresi; hak dan kewajiban organ institusi perguruan tinggi baik dari internal maupun eksternal (publik), membentuk kebebasan akademik di era digital, pentingnya kebebasan akademik dan implikasinya.

PEMBAHASAN

Prinsip Kebebasan Akademik

Universitas adalah tempat di mana kebebasan akademik didukung dan diwujudkan dalam berbagai praktik universitas (berbagai bentuk kebebasan akademik). Universitas adalah pusat kebebasan akademik, pusat kehidupan budaya dan sosial di seluruh dunia (Deklarasi universal HAM, 1948; Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966). Kebebasan akademik harus dihormati dan merupakan hak asasi manusia dan bebas dari ancaman (Parlemen Eropa/ Uni Eropa, 2018).

Prinsip kebebasan akademik dalam pengaturan universitas menurut UNESCO adalah Pertama, *'toleransi terhadap pendapat yang berbeda'*, Universitas harus mentolerir pendapat yang menyimpang, harus secara aktif memberikan dukungan untuk posisi yang bertentangan dengan mereka sendiri, bahkan mendukung mereka yang mempertanyakan legitimasi pandangan resmi mereka sendiri; Kedua, *'bebas dari campur tangan politik.'*, Civitas akademika (Administrator, fakultas, dan mahasiswa) harus bebas dari campur tangan politik saat mereka menjalankan perannya di dalam mengembangkan dan menyetujui kurikulum, menetapkan topik penelitian dan melakukan penelitian; Mengatakan 'tidak' untuk setiap intervensi. Ketiga, *'Memfasilitasi masyarakat memahami prinsip demokrasi dan manusiawi'*, dengan mengembangkan ikatan lintas batas wilayah, dan mengembangkan bentuk kehidupan bersama yang menghormati martabat manusia. Prinsip ini sekaligus menyiratkan bahwa universitas bukanlah unit mandiri, tetapi bagian dari lautan universitas di dunia.

Kebebasan berekspresi/ Berbicara VS Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang digambarkan sebagai hak individu/ kolektif dan tanggung jawab. Kebebasan akademik adalah hak sekaligus kewajiban (Gardner, 2018; Motta, 2018). Namun, seringkali ada ketidakpastian/ kebingungan bagi komunitas ilmiah tentang sifat kebebasan akademik. Seringkali kebebasan akademik dengan kebebasan berpikir/ berekspresi bercampur. Kebebasan berpikir/ kebebasan berekspresi terkait dengan kebebasan akademik, tetapi mereka tidaklah sama. Kebebasan akademik seharusnya tidak digabungkan dengan kebebasan berbicara /berekspresi (Butler, 2017). Kebebasan berbicara dan kebebasan akademik, keduanya adalah antitesis (Sultana, 2018). Kebebasan berbicara tidak sama dengan kewajiban untuk berbicara secara bertanggung jawab/ kebebasan akademik

(Vrieling et al., 2011). Seseorang dalam kehidupan publik mungkin menjalankan kebebasan berekspresi (hak individu untuk berekspresi), akan tetapi mereka yang bekerja dalam kerangka kebebasan akademik di Universitas memiliki kewajiban tertentu. Hunt (2010) mengidentifikasi perbedaan kritis: 'bukan apakah orang yang berbicara mencapai atau tidak kesimpulan yang benar (kebebasan berbicara), tetapi apakah bukti dan alasan tentang bukti tersebut memenuhi standar yang wajar untuk penyelidikan yang cermat dan analisis (kebebasan akademik). Kebebasan berekspresi terkadang mengekspresikan pandangan yang dianggap 'ofensif, tidak bijaksana, tidak bermoral atau salah arah'. Kebebasan berekspresi sering mengklaim sesuatu yang "mutlak" *'Saya tidak setuju dengan apa katamu, tetapi aku akan membela sampai mati hakmu untuk mengatakannya'*. Bebas berbicara tetapi umumnya tidak dapat dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik (Vrieling et al., 2011).

Kebebasan akademik mencakup 'hak berbuat salah' dan harus melindungi pendapat akademis yang mungkin salah. Pendapat akademis harus memiliki dasar dalam penalaran atau bukti (Vrieling, 2011). Kebebasan berbicara "akademis" berpendapat dengan berkualitas dan berkontribusi untuk kepentingan umum. Maka kebebasan akademik harus mendapat perlindungan yang lebih tinggi daripada kebebasan berpendapat lainnya. Kebebasan akademik memberikan perlindungan kepada insan akademisi dari campur tangan pihak manapun, supaya ilmu dan kemandirian berpikir dan berekspresi dimiliki oleh warga akademik.

Hak dan Kewajiban Perguruan Tinggi (Sisi Internal dan Sisi Eksternal)

Kebebasan akademik mengacu pada kebebasan melakukan penelitian, mengajar, berbicara, dan mempublikasikan, tunduk pada norma dan standar penyelidikan ilmiah, tanpa / bebas dari campur tangan atau hukuman, di mana pun pencarian kebenaran dan pemahaman dapat mengarah (PBB, 2005). Aspek kebebasan akademik menurut Vrieling et al (2011) adalah (a) Hak untuk berekspresi bagi anggota akademisi (staf dan mahasiswa), kebebasan bertanya, belajar, mengajar, meneliti, berekspresi dan publikasi (termasuk 'hak berbuat salah'), dan hak melakukan kegiatan profesional di luar akademik; (b) Otonomi, departemen, fakultas dan universitas memiliki hak dan kewajiban untuk melestarikan dan mempromosikan prinsip kebebasan akademik di ranah internal dan eksternal; (c) Kewajiban bagi otoritas publik untuk menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

Fakultas berhak mengejar penelitian dan pemikiran, tanpa campur tangan pemerintah atau otoritas lainnya dan berhak atas pembuatan kurikulum dan tata kelola. Kewajiban Fakultas meliputi Pertama, berpartisipasi dalam pemerintahan, membina dan mengarahkan hubungan kelembagaan yang mengamankan tugas pendidikan tinggi, termasuk

melestarikan dan mendukung pemikiran kritis, bahkan ketika tidak sejalan dengan pandangan resmi negara atau lembaga eksternal lainnya; Kedua, kewajiban melestarikan institusi sebagai tempat di mana kebebasan penyelidikan dapat dan memang terjadi, bebas dari intervensi, dan sensor; Ketiga, kewajiban memberikan nasihat yang bertanggung jawab, berbicara berdasarkan pendapat dan tidak mengklaim apa pun.

Hunt, 2010 juga mengemukakan hak terkait kebebasan akademik, yaitu kebebasan staf dan mahasiswa, untuk mengajukan pertanyaan/ ide dan menyatakan pendapat kontroversial/ tidak populer; terlibat dalam penelitian; dan kebebasan lembaga mempromosikan pembelajaran dan mengangkat staf sendiri.

Kewajiban/ peran institusi Perguruan Tinggi yang berpijak pada kebebasan akademik, yaitu menyediakan wadah bagi pemikiran akademis dan penelitian, dengan mereproduksi dan memelihara secara tepat kebebasan berpikir, bertanya dan berekspresi; membuka kemungkinan pemikiran bebas dan kritis, termasuk posisi intelektual yang mempertanyakan status quo, kebijakan pemerintah, dan bahkan kemungkinan formasi politik baru. Sudut pandang yang dianut universitas seharusnya dilindungi dan didukung, termasuk pandangan perbedaan pendapat politik dalam kehidupan publik sebagai kebebasan ekspresi; Universitas bebas membayangkan bentuk alternatif hubungan antar masyarakat dan hubungan antar masyarakat dan negara, mengembangkan keadilan, transformasi dan kebebasan baru dalam menanggapi realitas sejarah yang memaksa pemikiran. Mengembangkan bentuk pemikiran dalam kaitannya dengan krisis sejarah, pemikiran kritis, mempertanyakan pra-anggapan; Kebebasan membayangkan transformasi masyarakat sebagai bagian dari kebebasan akademik. Negara dan berbagai bentuk kekuasaan yang wajib melindungi dan mendukung kebebasan.

Kewajiban dalam konteks akademis, adalah mengenalkan batasan-batasan, termasuk kebenaran bukti dan menciptakan batas yang terkait dengan keahlian akademik, termasuk siapa yang dapat mendukung konten pengajaran, publikasi, dan penyebaran yang lebih luas di ranah publik. Kewajiban publik secara Nasional dan Internasional terkait kebebasan akademik (Bartel 2019), yaitu.

1. Universitas, berkewajiban mempromosikan, melalui pengajaran dan penelitian, prinsip kebebasan dan keadilan, martabat dan solidaritas manusia, dan mengembangkan bantuan material dan moral bersama di level internasional.
2. Menolak campur tangan politik dalam penelitian dan pengajaran dan membentuk penyelidikan yang bertujuan memahami prinsip kebebasan, keadilan, martabat manusia, dan solidaritas.

3. Mengajarkan bentuk-bentuk solidaritas yang meningkatkan prospek kebebasan, keadilan, dan martabat di dunia, dan mencontohkan / memberlakukan prinsip ini, menempa ikatan solidaritas satu sama lain.
4. Melindungi kritik dari penindasan dan pembalasan, mempertahankan ikatan dengan universitas lain dalam upaya memperjelas dan mempromosikan tujuan pendidikan tinggi dalam konsepsi luas kehidupan publik yang berkomitmen pada keadilan, kesetaraan, dan martabat. Universitas harus mempertahankan sudut pandang prinsip demokrasi dalam masyarakat. Ketika universitas menolak campur tangan pihak luar, maka sudah sepatutnya universitas ikut bergabung dan didukung universitas lain di seluruh dunia. Ini bukan hanya etika dan kewajiban, tetapi tugas penting universitas.

Kebebasan Akademik di Era Digital

Banyak ide /opini diterbitkan melalui jalur akademik dan melalui jalur internet, blog, media sosial, dan media massa. Google & Google scholar menjadi *platform* yang sempurna, yang memungkinkan ide-ide akademis dan non-akademik berbaur. Penyebaran ide/ opini via internet sukses menggabungkan ide-ide akademik dan sosial yang ada di jurnal akademik dan tempat lain. Timbul pertanyaan, apakah opini yang dipublikasikan adalah informasi yang telah diperiksa secara ketat oleh rekan, informasi yang tidak ditinjau oleh rekan sejawat, atau informasi yang diklaim sebagai ulasan sejawat tetapi sebetulnya tidak. Akibatnya, terjadi benturan/ salah paham antara akademisi dan masyarakat.

Akademisi telah berevolusi, yaitu tidak lagi hidup atau berkembang di menara eksklusivitas teori, akan tetapi melalui akses terbuka (media internet), masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap perdebatan berbagai opini, apakah teoretis, perdebatan sains berbasis bukti, atau sains semu. Sebuah pendapat, pada dasarnya bisa saja bias (subjektif), karena mencerminkan gagasan penulis, yang juga dipengaruhi oleh gagasan dan ekspresi terbuka dari akademisi lain, serta pengaruh masyarakat di mana akademisi terintegrasi (Teixeira dan Silva, 2021). Suatu pendapat meskipun menimbulkan kehebohan, kontroversi atau pujian, apakah netral, marjinal, atau radikal, tidak populer, tidak sensitif, itu harus diizinkan dalam batas-batas dunia "akademik" karena ini adalah sifat kebebasan berbicara akademik (Bartel, 2019).

Ketika opini akademisi yang dimuat dalam jurnal akademik sebagai surat/ komentar kepada redaksi, ditarik kembali berdasarkan sensitivitas dan keberatan yang dilontarkan misalnya di media sosial, perlu ada refleksi tentang apa penyebabnya. Pencabutan pendapat yang dipicu oleh tekanan, tidak hanya melumpuhkan debat akademis, tetapi juga mengirim

pesan bahwa pendapat perlu dimoderasi dan distandarisasi untuk memenuhi permintaan pasar / parameter hukum, kebenaran politik, serta nilai bisnis dan komersial, ketimbang nilai akademis. Makalah mungkin ditarik/ dibatalkan penerbitannya dengan alasan non-akademik dan penolakan yang tidak adil ini, mencerminkan bias editorial, dan mengancam kebebasan akademik (Teixeira da Silva et al., 2021). Ini adalah bentuk pelanggaran akademik oleh editor yang terlibat dalam praktik tidak demokratis. Penolakan yang tidak adil dalam bentuk pencabutan yang tidak adil, yaitu, editor atau peer review menarik kembali sebuah makalah yang telah diterbitkan, yang menunjukkan nilai-nilai penerbitan kapitalistik berbenturan dengan nilai-nilai penerbitan akademis. Perguruan tinggi hendaknya juga melakukan pengawalan, sehingga pencabutan sebuah makalah tidak dilakukan untuk tujuan menekan, menyensor, atau menghapus pendapat. Keterlibatan dalam dialog yang penuh semangat, melalui komentar balik, harus diupayakan untuk memastikan bahwa pendapat tetap menjadi bagian integral dari percakapan akademis, bahwa kebebasan berbicara tidak terancam oleh ketakutan dan intimidasi, dan bahwa pencabutan hanya berfungsi untuk mengoreksi penelitian yang salah yang didorong oleh data dan berbasis bukti, dan bukan sebagai alat untuk menekan opini atau meningkatkan perbedaan pendapat.

Dalam semangat akademik, untuk mempertahankan wacana ilmiah yang berkelanjutan, mereka yang memiliki pendapat yang bertentangan, termasuk masyarakat umum, cara terbaik untuk melawan adalah dengan membiarkan suara-suara yang tidak setuju untuk mengekspresikan diri, juga kebebasan membuat surat/ komentar kepada editor. Debat akademik yang sehat dan bebas adalah tidak ada benar atau salah, dapat diterima atau tidak dapat diterima, tetapi membolehkan pandangan yang secara radikal menentang atau konservatif untuk hidup berdampingan atau bersaing dengan cara yang tidak mengancam secara intelektual. Ini tampaknya menjadi cara yang paling terbuka, adil, liberal, dan seimbang dalam menghadapi sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, universitas memainkan peran sentral dalam mempromosikan kebebasan akademik (Butler, 2017) dan jurnal akademik menghadapi tantangan untuk menyediakan *platform* yang aman untuk mengakomodasi perdebatan, memungkinkan penyelidikan didasarkan pada pendapat yang berbeda, dan mempromosikan kebaruan dalam pemahaman, meskipun ada perbedaan pendapat. Jurnal harus memberikan kesempatan bagi akademisi untuk memberikan komentar sebagai tanggapan atas komentar, sehingga berfungsi sebagai platform untuk debat terbuka.

Pentingnya Kebebasan Akademik dan Implikasi

Mengapa kebebasan akademik penting bagi universitas? Rittberger & Richardson, 2019 menjelaskan bahwa jika kita tidak membela kebebasan akademik, maka *'Tidak ada pengantar, Tidak ada argumen dan kontribusi, Tidak ada analisis, Tidak ada kesimpulan dan jalan untuk penelitian masa depan dan Tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan'*.

Universitas yang gagal menjalankan praktik kebebasan akademik (gagal memasukkan dan mendukung pengajaran dan penelitian di bidang demokrasi, ranah kebebasan dan keadilan serta martabat dan solidaritas), maka universitas gagal memenuhi kewajiban publiknya dan kehilangan haknya untuk mengklaim tempat di antara universitas-universitas dunia (Bartel, 2019). Jika universitas adalah tempat di mana kebebasan akademik didukung dan diwujudkan dalam praktik universitas dan organisasi internasional yang mewakili pendidikan tinggi di seluruh dunia, maka yang harus dilakukan oleh universitas adalah sudah waktunya untuk solidaritas yang radikal dan gigih, berbicara dan bertindak, mem bentuk solidaritas yang baru dan tak kenal lelah, tidak berdiam diri. Kebebasan akademik harus dihormati. kebebasan akademik sebagai hak asasi manusia (Parlemen Eropa/hak Uni Eropa, 2018).

PENUTUP

Prinsip kebebasan akademik telah menjadi standar internasional. Universitas yang gagal menghormati prinsip kebebasan akademik (demokrasi/ toleransi, bebas dari campur tangan) berarti melepaskan diri dari komunitas internasional dan keluar dari norma-norma yang dikembangkan dan dihormati di dalam komunitas ilmiah. Seperti peribahasa *'The price of liberty is eternal vigilance'*, kebebasan akademik juga berarti adanya kewaspadaan di dunia akademik, keterbukaan untuk mempertahankan pendapat dan menerima kritik. Kebebasan akademik bukan terbatas pada dokumen hukum, akan tetapi semua pihak terkait, yaitu organ perguruan tinggi, dunia penerbitan jurnal, pemerintah dan regulator bersama sama dapat memberikan pengaruh untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartel, R. (2019). Academic freedom and an invitation to promote its advancement. *Geographical Research*, 57(3), 359-367.
- Butler, J. (2017). Academic Freedom and the Critical Task of the University. *Globalizations* 14(6), 857-861.
- Motta, M., 2018. The dynamics and political implications of anti-intellectualism in the United States. *Am. Politics Res.* 46 (3), 465-498.

- Gardner, M. (2018). The ARC controversy, Australian Book Review December 407. Available at: <https://www.australian-bookreview.com.au/abr-online/archive/2018/233-december2018-no-407/5217-the-arc-controversy>.
- Hunt, T. (2010). The rights and responsibilities implied by academic freedom. *Personality and Individual Differences*, 49(4), 264–71
- Sultana, F. (2019). Decolonizing development education and the pursuit of social justice. *Hum. Geogr.* 12 (3), 31–46. doi: 10.1177/194277861901200305.
- Teixeira da Silva, J.A. (2021). How to shape academic freedom in the digital age? Are the retractions of opinionated papers a prelude to “cancel culture” in academia? *Current research in Behavioral Sciences 2*. 100035.
- Tierney, W.G and Lanford, M. (2014). The Question of Academic Freedom: Universal Right or Relative Term *Front. Educ. China* 2014, 9(1): 4–23.
- Vrieling, J., Lemmens, P., Parmentier, S., and the League of European Research Universities' Working Group on Human Rights, 2011. Academic freedom as a fundamental right. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 13(January), 117–41

PROFIL SINGKAT

SeTin, lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara pada 08 Desember 1976. Menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Kristen Maranatha (1995); Program Magister Sains di Universitas Gadjah Mada (2002), Program Profesi Akuntansi di Universitas Widyatama (2004) dan menyelesaikan Program Doktor di Universitas Trisakti (2019). Sejak 2002-sekarang menjadi Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, dengan bidang keahlian Akuntansi Manajemen. Berjabatan akademik Lektor Kepala / IV B. Berpengalaman di dalam berbagai pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu sebagai Ketua Program Studi, Dekan, dan Wakil Rektor.